

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomian negara. Pentingnya pertanian dalam pembangunan perekonomian negara disebabkan karena adanya potensi sumber daya alam yang melimpah dan beragam serta sumber pendapatan nasional dan nilai ekspor yang relatif besar (Sakdiyah *et al.*, 2023). Selain itu, sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja sebesar 40,75 juta orang dari 144,64 juta orang atau setara dengan 28,18% dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2024).

Salah satu jenis pekerjaan di bidang pertanian adalah buruh tani. Dalam sistem agribisnis, buruh tani merupakan pelaku agribisnis yang dominan beraktivitas pada subsistem *onfarm* yang kegiatannya merujuk pada kegiatan produksi pertanian seperti kegiatan penanaman, pemeliharaan, panen, dan pengolahan awal (Rasmikayati *et al.*, 2018). Pendapatan buruh tani bersumber dari hasil bekerja di lahan orang lain yang upahnya dapat berupa upah harian yang sesuai dengan jumlah hari kerja, upah borongan yang diterima berdasarkan jumlah buruh yang bekerja, dan sistem bagi hasil yang diterima tergantung banyaknya hasil produksi dan kesepakatan pemilik lahan (Aulia *et al.*, 2024).

Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Indonesia tidak menjamin kesejahteraan hidup buruh tani. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagian besar berasal dari daerah pedesaan dan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Padahal dengan lahan pertanian yang luas, penduduk di pedesaan Indonesia harusnya dapat hidup makmur dan sejahtera. Namun kenyataannya, masyarakat pedesaan terutama petani atau buruh tani banyak yang mengalami kemiskinan. Hal ini membuat publik beranggapan bahwa petani dan masyarakat yang hidup di pedesaan identik dengan kemiskinan (Yacoub *et al.*, 2020). Di mata publik, petani khususnya buruh tani seringkali dianggap sebagai perlindungan dari status pengangguran sehingga sebagian besar petani dikategorikan sebagai petani miskin. Salah satu faktor kemiskinan yang dialami petani, yaitu kurangnya lahan pertanian, sehingga banyak dari mereka memilih bekerja di sawah orang lain untuk menjadi buruh tani (Dwi *et al.*, 2021). Selain itu, pendapatan buruh tani yang rendah dan tidak sebanding dengan kerja kerasnya menjadikan buruh tani jauh dari kata sejahtera atau tergolong miskin.

Pendapatan buruh tani yang berupa upah merupakan hak buruh tani sebagai imbalan yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan (Salsabila, 2021). Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengupahan, bahwa upah merupakan hak buruh/pekerja sebagai imbalan dari pemberi kerja yang dibayarkan dan ditetapkan sesuai perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, upah nominal buruh tani pada bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp59.226 meningkat 0,22% dari upah nominal buruh tani pada bulan November 2022

sebesar Rp59.096. Jika diasumsikan terdapat 22 hari kerja, maka dalam sebulan pendapatan buruh tani mencapai Rp1.303.132.

Bangun *et al.* (2021) membagi pendapatan menjadi 4 golongan, yaitu: a) Pendapatan Sangat Tinggi, jika pendapatan rata-rata berada di atas Rp. 3.500.000 per bulan, b) Pendapatan Tinggi, jika pendapatan rata-rata penduduk sebesar Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.500.000 per bulan, c) Pendapatan Sedang, jika pendapatan rata-rata berkisar antara Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.500.000, dan d) Pendapatan Rendah, jika pendapatan rata-rata Rp. 1.500.000 per bulan. Berdasarkan jumlah upah nominal buruh tani sebagaimana yang tertuang dalam BPS tahun 2023, maka pendapatan buruh tani termasuk pendapatan golongan rendah. Ketika pendapatan buruh sangat rendah maka buruh tani akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga nya sehari-hari (Sari *et al.*, 2022).

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Pangan mengandung zat gizi yang berfungsi dalam memperbaiki jaringan yang rusak, mengatur proses yang terjadi di dalam tubuh, sebagai sumber energi, serta membantu dalam beraktivitas dan berkembangbiak (Saputro *et al.*, 2020). Pangan termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana negara wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu, dan aman secara merata di seluruh Indonesia (Rumawas *et al.*, 2021).

Menurut Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari kuantitas maupun kualitas, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat hidup dengan sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 diatas, berisi tentang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan ketersediaan pangan, swasembada pangan, kemandirian pangan, serta keamanan.

Berdasarkan laporan *Economist Impact* (2022) terkait nilai *Global Food Security Index* (GFSI), Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara pada tingkat ketahanan pangannya. Penilaian ini diukur melalui empat indikator, yaitu: (1) ketersediaan (*availability*), (2) keterjangkauan (*affordability*), (3) kualitas dan keamanan (*quality and safety*), serta (4) keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*) (Ronaldo *et al.*, 2024). Pada indikator keterjangkauan merupakan indikator tertinggi dengan nilai 81,4 sedangkan indikator keberlanjutan dan keamanan dengan nilai terendah yaitu 46,3. Dapat diartikan bahwa dalam memastikan keterjangkauan pangan sampai ke masyarakat, Indonesia sangatlah unggul. Hal ini disebabkan karena adanya pengamanan pangan dan keamanan pangan yang kuat. Sedangkan, di sisi lain Indonesia masih mengalami kesenjangan dalam kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan aman pangan (Maulana *et al.*, 2024).

Saat ini, mewujudkan ketahanan pangan tidak lagi hanya berfokus pada tersedianya pangan dalam skala nasional, namun harus sampai pada tingkat yang lebih sempit yaitu keluarga (Naibaho & Aritonang, 2022). Kondisi negara yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang terjamin tidak selalu mencerminkan ketahanan pangan rumah

tangga. Ketahanan pangan rumah tangga justru menjadi indikator terbentuknya ketahanan pangan daerah, baik wilayah maupun regional. Sedangkan pengeluaran total yang terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga merupakan salah satu indikator ketahanan pangan rumah tangga. Selain itu, indikator lain dari ketahanan pangan yaitu kecukupan zat gizi, yang dinilai melalui konsumsi zat gizi makro (Anzaini et al., 2022).

Ketahanan pangan buruh tani yang merupakan bagian dari masyarakat petani seyogyanya dapat terpenuhi. Namun kenyataannya, beberapa hasil penelitian yang menemukan bahwa kondisi ketahanan pangan buruh tani ternyata masih belum baik karena 80% rumah tangga buruh tani mengalami rawan pangan. Oleh karena itu, buruh tani termasuk kelompok yang rentan mengalami kondisi rawan pangan (Prasetyaningtyas & Nindya, 2018).

Kerawanan atau ketahanan pangan, kemiskinan, dan pendapatan merupakan hal yang saling berhubungan (sebab akibat). Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi pangan di masyarakat. Meningkatnya pendapatan akan menyebabkan pengeluaran konsumsi ikut meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan menurun maka pengeluaran konsumsi juga ikut menurun (Anam, 2023). Ketika konsumsi pangan menurun, maka tingkat ketahanan pangan menurun.

Oleh karena itu, demi memberantas kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah menghadirkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan memberikan bantuan sosial terhadap rumah tangga miskin agar mampu meningkatkan akses pangan, pendidikan, dan kesehatan (Utari, 2023). Program Keluarga Harapan pertama kali muncul pada tahun 2007 dengan memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Pertiwi et al., 2019). Program ini merupakan program bantuan tunai bersyarat dengan tujuan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, memberi fasilitas kesehatan yang layak, dan menyekolahkan anak.

Awalnya, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya dilaksanakan di tujuh provinsi yang ada di Indonesia, namun pada tahun 2014 telah dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang sangat diandalkan pada era Presiden Joko Widodo sebagai upaya pemberantasan kemiskinan (Tampubolon et al., 2024). Program Keluarga Harapan merupakan bantuan yang memberikan dampak positif untuk menekan kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini karena selain memberikan bantuan dana, program ini juga memberikan bantuan berupa pelatihan dan bimbingan mengenai pemenuhan gizi keluarga dan kesehatan keluarga.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 200 ribu jiwa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 sebesar 237.120 jiwa meningkat pada tahun 2023 menjadi 238.240 jiwa dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 239.360 jiwa. Adapun luas wilayah Kabupaten Soppeng sebesar 1.359,44 km². Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng tentunya akan meningkatkan kebutuhan pangan.

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Soppeng tahun 2024 sebesar 87,9. Nilai ini menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng memiliki IKP yang tinggi. Adapun pada tahun 2023, nilai IKP Kabupaten Soppeng adalah 86,16. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun, IKP Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan sebesar 1,74. Walaupun demikian, di salah satu kecamatannya, yakni Kecamatan Lilirilau terdapat satu desa yang masyarakatnya penerima Program Keluarga Harapan tertinggi, yakni Desa Baringeng. Hal ini disebabkan karena desa ini termasuk desa yang penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Keadaan ini otomatis menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di desa tersebut. Oleh karena itu, pihak Dinas Sosial setempat memberikan bantuan Program Keluarga Harapan, yakni sebanyak 306 Rumah Tangga dari 1.900 Rumah Tangga.

Berdasarkan latar belakang ini, perlu disediakan informasi ilmiah sebagai hasil analisis fakta-fakta adanya pendapatan riil yang diperoleh buruh tani dan tingkat ketahanan pangan rumah tangganya serta hubungan antara keduanya (pendapatan dan ketahanan pangan) melalui penelitian berjudul **“Analisis Pendapatan Buruh Tani dan Hubungannya dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Kasus Rumah Tangga Buruh Tani Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)”**.

Penelitian terkait analisis pendapatan dan tingkat ketahanan pangan rumah tangga telah banyak dilakukan dengan judul dan metode yang berbeda-beda, namun belum ada yang mengkaji pendapatan dan ketahanan pangan rumah tangga di Desa Baringeng khususnya pada buruh tani yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2020) dengan judul “Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten”. Penelitian ini menggunakan metode survey pada 37 orang petani padi sawah di Desa Pawindan dan ditentukan secara acak sederhana. Hasil menunjukkan bahwa dari rata-rata pendapatan rumah tangga petani sebesar Rp3.228.000, pendapatan sebagai petani yang berkontribusi besar dengan jumlah 75,95%. Adapun tingkat ketahanan pangan berdasarkan indikator aksesibilitas rumah tangga tergolong tinggi, berdasarkan tingkat subsistensi tergolong rendah, dan berdasarkan pangsa pengeluaran pangan tergolong rendah. Sehingga ketahanan pangan rumah tangga petani di Desa Pawindan tergolong tahan pangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aziza et al. (2022) dengan judul “Analisis Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi di Desa Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan rumus pendapatan rumah tangga petani. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan usahatani padi petani pemilik-penggarap dengan luas lahan 0,25 Ha sebesar Rp. 9.996.499 per tahun dan pendapatan rumah tangga petani penggarap dengan luas 0,30 Ha sebesar Rp. 5.350.035 per tahun.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Rochmania & Rahayu (2023) dengan judul “Hubungan Diversifikasi Pendapatan dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara”. Penelitian ini menganalisis tentang hubungan diversifikasi pendapatan dengan ketahanan pangan dengan menggunakan

metode *chi-square*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran pangan sebesar 54,65% dari total pengeluaran, dan TKE responden sebesar 83,07%. Pada rumah tangga petani terdapat 34,09% tahan pangan, 22,73% untuk kurang pangan dan rawan pangan, serta 20,45% yang rentan pangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara diversifikasi pendapatan dengan ketahanan pangan rumah tangga.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nainggolan et al. (2024) dengan judul “Analisis Pendapatan dan Ketahanan Pangan Nelayan Tradisional di Kota Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini dilakukan di Kota Sibolga dengan populasi sebanyak 645 Kepala Keluarga. Sampel pada penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin dan diperoleh 42 responden. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus pendapatan, pengeluaran, dan pangsa pengeluaran pangan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa sekitar 60% responden memiliki proporsi pengeluaran pangan >60,0%, dengan rata-rata konsumsi Rp1.729.482/bulan.

Dari berbagai penelitian di atas, belum ada yang membahas secara *holistic* pendapatan buruh tani dan hubungannya dengan tingkat ketahanan pangan rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan.

1.2 Rumusan Masalah

Kerentanan akan terjadinya kondisi rawan pangan di kalangan buruh tani sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Buruh tani merupakan salah satu penentu perputaran ekonomi baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Buruh tani yang bekerja di bidang pertanian, sebagaimana diketahui bersama bahwa pertanian berperan sebagai sumber pendapatan, pembuka lapangan kerja, pemberantas kemiskinan, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kontribusi pertanian terhadap pembangunan ekonomi dapat dinilai dari pendapatan usahatani dan surplus yang dihasilkan dari sektor tersebut. Namun, fenomena kemiskinan di kalangan petani masih banyak ditemukan. Hal ini disebabkan kurangnya lahan pertanian yang mereka miliki sehingga harus beralih profesi menjadi buruh tani (Alfrida & Noor, 2017).

Pendapatan buruh tani yang rendah, tentunya akan membuat rumah tangga buruh tani mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, terlebih dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sejalan dengan keadaan ini, maka Pemerintah memunculkan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya menjadi targetnya adalah rumah tangga miskin. Program ini bertujuan sebagai program dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Temuan fakta bahwa Desa Baringeng sebagai desa dengan rata-rata penduduk bekerja sebagai buruh tani dan menjadi desa penerima Program Keluarga Harapan tertinggi di Kecamatan Lilirilau, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di desa ini cukup tinggi pula. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapatan buruh tani penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau?
2. Bagaimana tingkat ketahanan pangan rumah tangga buruh tani penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau?

3. Bagaimana hubungan kontribusi pendapatan buruh tani dengan ketahanan pangan rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pendapatan buruh tani penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau.
2. Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan rumah tangga buruh tani penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau.
3. Untuk menganalisis hubungan kontribusi pendapatan buruh tani dengan ketahanan pangan rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau.

1.4 Kegunaan Penelitian

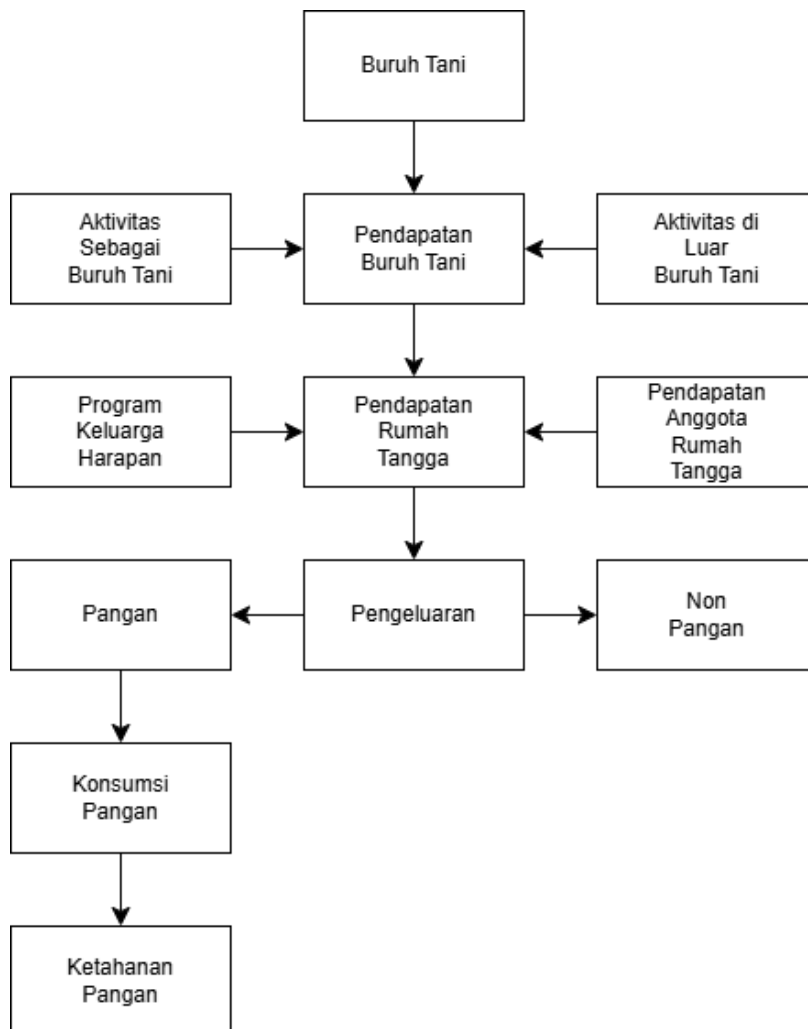
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan masukan bagi pemerintah dalam merancang strategi untuk meningkatkan pendapatan buruh tani dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
2. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait analisis pendapatan buruh tani yang dikaitkan dengan ketahanan pangannya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar dari pemikiran penelitian yang digabungkan dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan sehingga memuat teori atau konsep yang akan dijadikan dasar penelitian. Kerangka pemikiran berisi variabel-variabel penelitian yang dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Syahputri et al., 2023).

Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggambarkan variabel pendapatan buruh tani yang diperoleh dari aktivitasnya sebagai buruh tani pada subsistem *onfarm* (usaha tani) dan juga dari aktivitasnya di luar usaha tani. Selanjutnya, menggambarkan hubungan antara beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Variabel utama yaitu buruh tani yang memperoleh pendapatan baik dari profesi sebagai buruh tani, maupun profesi selain dari buruh tani. Selain itu juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Program Keluarga Harapan serta yang bersumber dari anggota rumah tangga yang lain. Pendapatan tersebut akan membentuk pendapatan rumah tangga, yang kemudian dialokasikan dalam bentuk pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Pengeluaran pangan akan berpengaruh terhadap konsumsi pangan rumah tangga, yang akhirnya akan mencerminkan tingkat ketahanan pangan rumah tangga buruh tani secara keseluruhan. Berikut merupakan kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat suatu hipotesis bahwa “Pendapatan buruh tani berhubungan positif dengan ketahanan pangan rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan”.

BAB II. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2024 di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan bahwa 79,12% luas wilayah di Desa Baringeng dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (Balai Penyuluhan Pertanian Lilirilau, 2021). Selain itu, sekitar 96,73% atau setara dengan 296 dari 306 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng berprofesi sebagai petani/pekebun (Pendamping PKH Kecamatan Lilirilau, 2024).

2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yang bersifat sistematis, objektif, dan berdasarkan perhitungan, pengukuran, rumus, serta kepastian numerik untuk menjawab hipotesis penelitian (Waruwu, 2023). Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data pendapatan sebagai variabel yang diduga berhubungan dengan tingkat ketahanan pangan rumah tangga buruh tani penerima Program Keluarga Harapan.

2.2.1 Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, dan menggunakan alat kuesioner. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan atau tempat penelitian (Edrisy & Rozi, 2021). Data primer dari penelitian ini diperoleh dari rumah tangga buruh tani di Desa Baringeng yang menerima Program Keluarga Harapan. Berikut teknik pengumpulan data primer yang dilakukan pada penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan responden. Kegiatan ini dilakukan dengan pengajuan pertanyaan dari peneliti dan dijawab oleh responden untuk menggali informasi terkait topik yang diteliti (Siti Romdona et al., 2025). Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan melakukan tanya jawab kepada responden terkait. Yang menjadi responden adalah anggota rumah tangga yang terdiri dari buruh tani, ibu rumah tangga, dan atau anggota rumah tangga lainnya yang mampu memberikan informasi terkait dengan alokasi pendapatan (pengeluaran pangan dan non pangan) serta data konsumsi pangan dan Program Keluarga Harapan.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis yang dijawab secara mandiri oleh responden, baik dalam bentuk kuesioner daring maupun kuesioner cetak (Fakhruddin & Saepudin, 2018). Pada penelitian ini, yang menjadi pertanyaan kuesioner yaitu terkait pendapatan, pengeluaran pangan dan non

pangan, serta konsumsi pangan dengan mengisi *food list* pekanan dan harian pada kuesioner. Pertanyaan pada kuesioner ini kemudian dijadikan sebagai acuan untuk mewawancarai responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui referensi dari luar, baik berupa artikel, jurnal, laporan, dan lain-lain (Siregar et al., 2022). Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng, dan data dari literatur yang berisi penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini.

2.3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan dua hal dasar yang menjadi inti dalam penarikan kesimpulan yang valid dan dapat memberikan pengalaman mendalam. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek dengan kriteria tertentu dalam pengambilan kesimpulan (Subhaktiyasa, 2024). Adapun populasi pada penelitian ini yaitu rumah tangga buruh tani penerima Program Keluarga Harapan yang jumlahnya sebanyak 296 rumah tangga.

Pada penelitian kuantitatif, sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik tertentu agar hasilnya dapat digeneralisasikan (Subhaktiyasa, 2024). Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{296}{1 + 296(0.10)^2} \\ &= \frac{296}{1 + 2.96} \\ &= \frac{296}{3.96} \\ &= 74,7 \end{aligned}$$

Jadi jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 75 rumah tangga. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *probability sampling* dengan menggunakan metode *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah metode pengambilan sampel yang setiap anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Syaputra, 2022).

2.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kuantitatif sesuai dengan data yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur.

2.4.1 Analisis Pendapatan

Pendapatan buruh tani diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan buruh tani baik yang bersumber dari kegiatan buruh tani maupun di luar buruh tani. Yang dapat dirumuskan:

$$\text{PBT} = \text{PABT} + \text{PANBT}$$

Adapun pendapatan rumah tangga buruh tani dihitung dengan menjumlahkan pendapatan buruh tani dengan pendapatan dari bantuan Program Keluarga Harapan

serta pendapatan anggota rumah tangga lainnya. Berikut rumus untuk menentukan pendapatan rumah tangga buruh tani.

$$\text{PRT BT} = \text{Pendapatan BT} + \text{Bantuan PKH} + \text{Pendapatan ART}$$

Keterangan:

BT = Buruh Tani
PBT = Pendapatan Buruh Tani
PRT = Pendapatan Rumah Tangga
PABT = Pendapatan Aktivitas Buruh Tani
PANBT = Pendapatan Aktivitas Non Buruh Tani
PKH = Program Keluarga Harapan
ART = Anggota Rumah Tangga

Untuk menganalisis kontribusi pendapatan buruh tani, peneliti menggunakan rumus analisis proporsi terhadap pendapatan total rumah rumah tangga. Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi pendapatan buruh tani terhadap pendapatan rumah tangga buruh tani. Berikut rumus untuk menentukan kontribusi pendapatan perkapita rumah tangga buruh tani.

$$\text{PBT} = \frac{\text{Pendapatan Buruh Tani}}{\text{Total Pendapatan Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Setelah memperoleh hasil proporsi pendapatan perkapita rumah tangga, hasil tersebut kemudian dikategorikan menjadi 4 tingkatan yang terdiri dari rendah, cukup rendah, cukup tinggi, dan tinggi. Berikut kategori tingkatan kontribusi pendapatan buruh tani terhadap pendapatan rumah tangga.

Tabel 1. Tingkatan Kontribusi Pendapatan Buruh Tani

No.	Persentase Kontribusi	Kategori
1.	1% - 24,75%	Rendah
2.	24,76% - 49,50%	Cukup Rendah
3.	49,60% - 74,25%	Cukup Tinggi
4.	74,25% - 100%	Tinggi

2.4.2 Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Buruh Tani Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau

Untuk tingkat ketahanan pangan rumah tangga dianalisis dengan menggunakan indikator menurut Jonsson dan Toole (dalam Martadona, 2022), yakni menggunakan proporsi pengeluaran pangan dan tingkat konsumsi energi perkapita perhari.

1) Analisis Proporsi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga:

Analisis ini digunakan untuk menilai berapa besar yang dikeluarkan untuk keperluan pangan rumah tangga buruh tani. Proporsi pengeluaran dapat diketahui dengan mengukur proporsi antara pengeluaran pangan rumah tangga dengan pengeluaran non pangan rumah tangga buruh tani. Berikut persamaan yang digunakan:

$$Tp = Pp + Pn$$

Keterangan:

Tp = Total pengeluaran rumah tangga (Rp)

Pp = Pengeluaran pangan (Rp)

Pn = Pengeluaran non pangan (Rp)

2) Analisis Tingkat Konsumsi Energi Rumah Tangga

Analisis ini dilakukan dengan mengukur konsumsi energi rumah tangga buruh tani menggunakan parameter tingkat konsumsi energi (TKE) dengan persamaan sebagai berikut:

$$TKE = \frac{\sum \text{konsumsi energi}}{AKE \text{ yang dianjurkan}} \times 100\%$$

Keterangan:

TKE = Tingkat Konsumsi Energi

$\sum$ = Total

AKE = Angka Kecukupan Energi yaitu 2100 (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019)

3) Analisis Ketahanan Pangan

Analisis ketahanan pangan dilakukan dengan menggunakan tabel penentuan tingkat ketahanan pangan rumah tangga menurut Jonsson dan Toole (dalam Martadona,2022). Dalam hal ini, digunakan dua indikator ketahanan pangan yaitu tingkat konsumsi energi (TKE) perkapita dan pangsa pengeluaran pangan yang dapat dilihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga. Berikut tabel yang menggambarkan indikator ketahanan pangan rumah tangga yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 2. Indikator Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Tingkat Konsumsi Energi	Pangsa Pengeluaran Pangan	
	Rendah (<60% Pengeluaran Total)	Tinggi (≥60% Pengeluaran Total)
Cukup (>80% Angka Kecukupan Energi)	1. Tahan Pangan	2. Rentan Pangan
Kurang (≤80% Angka Kecukupan Energi)	3. Kurang Pangan	4. Rawan Pangan

Sumber: Jonsson dan Toole dalam Martadona (2022)

Berdasarkan Tabel 2, sebuah rumah tangga dapat dikatakan tahan pangan apabila tingkat konsumsinya cukup (>80% Angka Kecukupan Energi) dan pangsa pengeluaran pangannya rendah (<60% Pengeluaran Total). Rumah tangga rentan pangan terjadi apabila tingkat konsumsinya cukup (>80% Angka Kecukupan

Energi) tetapi pangsa pengeluaran pangannya tinggi ($\geq 60\%$ Pengeluaran Total). Rumah tangga dikatakan kurang pangan apabila tingkat konsumsi energinya kurang ($\leq 80\%$ Angka Kecukupan Energi) dan pangsa pengeluaran pangannya rendah ($< 60\%$ Pengeluaran Total). Sedangkan rumah tangga dikatakan rawan pangan apabila tingkat konsumsi energinya kurang ($\leq 80\%$ Angka Kecukupan Energi) dan pangsa pengeluaran pangannya tinggi ($\geq 60\%$ Pengeluaran Total).

2.4.3 Analisis Hubungan Kontribusi Pendapatan Buruh Tani dengan Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Untuk menganalisis hubungan antara kontribusi pendapatan buruh tani penerima Program Keluarga Harapan dengan tingkat ketahanan pangan rumah tangga, digunakan analisis korelasi *rank spearman*. Data yang telah diolah terkait kontribusi pendapatan buruh tani dan ketahanan pangan rumah tangga dianalisis menggunakan *rank spearman* dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciencse*).

Apabila hasil dari analisis *rank spearman* menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan hubungan dua variabel tersebut berkorelasi. Namun, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dua variabel tersebut dinilai tidak berkorelasi. Selain penilaian tersebut, *correlation coefficient* dapat dinilai melalui interpretasi nilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai	Makna
0,00 – 0,25	Sangat Lemah
0,26 – 0,50	Cukup
0,51 – 0,75	Kuat
0,76 – 0,99	Sangat Kuat
1,00	Sempurna

Sumber: (Vusvitasari et. al., 2016)

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan peneliti untuk menghindari kesimpangsiuran dalam membahas dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Adapun definisi/batasan operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buruh tani adalah individu yang bekerja di bidang pertanian sebagai pekerja upahan dan bukan merupakan pemilik lahan.
2. Pendapatan buruh tani yaitu jumlah uang yang diperoleh buruh tani dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan baik dari aktivitas sebagai buruh tani maupun aktivitas di luar buruh tani dan dinilai dalam rupiah per bulan.
3. Pendapatan rumah tangga yaitu jumlah pemasukan yang diperoleh atas jasa atau usaha yang dijalankan rumah tangga buruh tani yang terdiri dari

pendapatan buruh tani, pendapatan anggota rumah tangga lainnya, dan pendapatan dari bantuan Program Keluarga Harapan (Rp/Bulan).

4. Rumah tangga adalah kumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang dipimpin oleh satu kepala keluarga dan makan bersama dalam satu dapur.
5. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anggota rumah tangga buruh tani yang diukur berdasarkan kandungan energinya (kkal/kap/hari).
6. Tingkat ketahanan pangan adalah indeks pengukuran ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan konsumsi energi dan proporsi pengeluaran pangan yang terdiri dari empat tingkatan yaitu tahan pangan, rentan pangan, kurang pangan, dan rawan pangan.
7. Tingkat konsumsi energi adalah rasio konsumsi energi terhadap kecukupan yang dianjurkan (2.100 kkal/kap/hari) dan dinyatakan dalam persen (%).
8. Pengeluaran rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga buruh tani baik pangan maupun non pangan (Rp/Bulan).
9. Pengeluaran pangan adalah biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga buruh tani untuk keperluan pangan rumah tangga seperti beras, ikan, sayur, buah, dan susu (Rp/Bulan).
10. Pengeluaran non pangan adalah biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga buruh untuk keperluan non pangan rumah tangga seperti obat-obatan, pajak, pakaian, dan pemeliharaan rumah.
11. Proporsi pengeluaran pangan adalah rasio pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga buruh tani, yang dinyatakan dalam persen (%).